

# Model Kebijakan Pendidikan Karakter di Madrasah

**Supa'at**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus

*e-mail: supaatkudus@yahoo.com*

---

DOI: 10.14421/jpi.2014.31.203-225

---

## **Abstract**

*The behavior deviationism in almost of our daily activities has caused realization that "character education" is very important, and the fact that our education system failed to achieve its goals. Therefore, it looks as if there were no solutions – multidimension crisis. Education must be a solution of a nation to gain the true development and prosperity. To know what really happen in our educational system and practice, it was done a research, in the 29 Islamic Senior High Schools (MA) in Kudus. This research findings show that, the concept of character education has substantively the same concept with the system of Islamic school education (madrasah), its difference is only in the referable value. The concept of philosophical character education refers to antropocentric, and madrasah refers to theocentric (religion). The socio-historic system of madrasah is really the model of character education or character based on character that is suitable with the condition in Indonesia.*

**Keywords:** *Character Education, Madrasah, Behavior, Value.*

## **Abstrak**

Penyimpangan perilaku di hampir semua sektor kehidupan telah menimbulkan kesadaran bahwa "pendidikan karakter" sangatlah penting, dan bukti bahwa sistem pendidikan kita telah gagal mencapai tujuannya. Bahkan, kegagalan ini seolah tidak ada jalan keluar – krisis multidimensi. Pendidikan seharusnya menjadi solusi bagi suatu bangsa untuk menggapai kemajuan dan kemakmuran hakiki. Untuk mengetahui apa yang terjadi dengan sistem dan praktik pendidikan,

dilakukan penelitian pada 29 Madrasah Aliyah yang ada di Kudus. Hasil peneltiaan menunjukkan bahwa konsep pendidikan karakter sesungguhnya memiliki kesamaan substantive dengan system pendidikan madrasah, perbedaanya terletak pada *nilai* yang dapat dijadikan petunjuk. Konsep pendidikan karakter secara filosofis mengacu pada kebenaran antroposentris, dan madrasah merujuk pada teosentris (agama). Secara sosio-historis system pendidikan madrasah adalah model pendidikan karakter atau pendidikan berbasis karakter yang cocok untuk kondisi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pendidikan Karakter, Madrasah, Sikap, nilai.

## Pendahuluan

Munculnya wacana pentingnya pendidikan karakter di sekolah lebih didorong oleh keprihatinan atas maraknya perilaku tidak terpuji di hampir semua lini kehidupan. Mulai dari tawuran anak sekolah di jalanan sampai tawuran antar kampung yang memakan korban jiwa dan harta yang tidak sedikit. Berbagai kasus lain yang seolah membalikkan logika, seolah bangsa ini tidak memiliki cukup peradaban dan moral-etik yang mampu menjadi penangkal bagi perilaku buruk dan destruktif. Nilai-nilai luhur seperti kejujuran, santun dan keramahan, kebersamaan, dan perilaku religius seolah hilang terkikis oleh “budaya baru” yang hedonistik, materialistik, dan individualistik. Walhasil, bangsa ini seolah tidak pernah mendapatkan pendidikan bagaimana menjadi warga negara dan masyarakat yang baik. Padahal senyatanya mereka telah mendapatkan pendidikan moral dan pendidikan agama mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

Pertanyaannya adalah “apa yang salah dengan sistem dan praktek pendidikan kita?”. Pertanyaan ini menjadi relevan dan penting karena, bukankah tujuan pendidikan kita adalah untuk menyiapkan peserta didik menjadi individu dan warga negara yang baik (baca: berkarakter).<sup>1</sup> Bila itu kenyataannya berarti sistem dan praktik pendidikan kita telah gagal mencapai tujuannya. Karena merujuk pada tujuan pendidikan nasional tersebut, masyarakat Indonesia yang telah mengenyam pendidikan seharusnya menjadi *mu'min* dan *mutaqqi>n* yang tentu berakhlak mulia. Orang yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia tidak mungkin melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, tetapi sebaliknya akan melakukan semua kebaikan yang diperintahkan agama. Terjadinya berbagai pelanggaran dan perilaku menyimpang tersebut mengindikasikan bahwa norma atau ajaran yang diterima

---

<sup>1</sup> Tujuan pendidikan nasional, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3, “...bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

oleh peserta didik baru sebatas pengetahuan (kognitif) yang tidak berkorelasi positif dalam sikap dan tindakan. Ini artinya kualitas pembelajaran (pendidikan) di sekolah/madrasah belum menyentuh domain penting yang sesungguhnya menjadi tujuan pendidikan, yaitu afeksi dan psikomotor.

Disamping itu, hal lain yang cukup membuat kita prihatin adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia bila dilihat dari sudut komparasi global. Merujuk pada laporan yang dirilis oleh UNDP (*United Nation Development Programme*) bertajuk *Human Development Report* tahun 2012, peringkat kualitas sumberdaya manusia kita cukup memprihatinkan. Dalam laporannya yang bertajuk *Human Development Index* (HDI) disebutkan Indonesia menduduki peringkat ke-124 dari 187 negara. Untuk memberi gambaran seberapa bagus posisi Indonesia bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan dua negara maju di Asia (Jepang dan Korea), berikut peringkat selengkapnya; Malaysia-61, Singapura-26, Thailand 103, Philipina 112, Brunai Darussalam 33, Myanmar 149, Laos 138, Timor Lorosae 147, Korea 15, Jepang 12. Terlepas dari perdebatan tentang beberapa kreteria dan/atau variabel yang digunakan untuk membuat kesimpulan tentang peringkat tersebut, setidaknya laporan tersebut cukup memberi informasi tentang kualitas sumberdaya manusia hasil dari proses pendidikan.

Keadaan tersebut terjadi antara lain karena adanya pergeseran tata kehidupan sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada pengabaian dan pengasingan nilai-nilai luhur dan transendental. Industrialisasi, modernisasi berbagai fasilitas kehidupan, globalisasi dalam bidang politik, ekonomi dan budaya telah membawa praktik pendidikan kita pada sebuah kondisi pragmatisme jangka pendek. Yang terjadi, praktik pendidikan kurang diimbangi pembekalan peserta didik dengan sistem nilai kehidupan yang komprehensif. Pada pendidikan formal kita (sistem persekolahan) terlalu berorientasi dan mengedepankan pengembangan intelektual-kognitif serta pengukuran tingkah laku yang bersifat akademis. Akibatnya sikap dan nilai yang berada pada wilayah afektif atau kecerdasan emosional dan kecerdasan soiritual peserta didik kurang teridentifikasi dan tergarap dengan baik.

Sebagai anak bangsa tentu kita tidak menginginkan keadaan itu terus terjadi dan berlangsung tanpa upaya untuk menghentikan dan memperbaikinya. Salah satu upaya yang cukup rasional adalah perlu dan pentingnya pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan. Dengan harapan kekurangan yang terjadi selama ini bisa disempurnakan, dan kesalahan yang terjadi bisa dibenarkan. Jepang dan Korea adalah contoh negara yang berhasil secara sistematis membentuk *nation character building* dengan segala cara, termasuk dengan cara-cara yang represif. Jepang dengan karakter budaya malu dan kerja kerasnya telah menghantarkan negara itu menjadi

“raja” yang dengan tekongloginya mampu menguasai dunia, demikian halnya dengan Korea. Semua itu bisa dicapai karena dua negara tersebut telah berhasil menanamkan nilai-nilai moral-etik menjadi karakter bangsa, seperti jujur, kerja keras, budaya malu (malu bila gagal/tidak berhasil), dan lain-lain.

Sebagai intrumen penting dan sekaligus *agent of change*, institusi dan kegiatan pendidikan harus mampu memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai media sosialisasi akulturasi dan enkulturasi dalam rangka pembentukan karakter bangsa.<sup>2</sup> Sebagai sebuah fenomena universal tujuan universal pendidikan adalah; “...to help young people become smart and to help them become good”. Oleh karenanya hasil pendidikan harus mencakup dua hal, yaitu cerdas (*smart*) dan perilaku yang baik (*good*). Dalam rumusan filsafat pendidikan klasik dikemukakan bahwa, “...the ultimate goal of education is how to facilitate student to be good citizens”. Dalam ungkapan Martin Luther King, “...we must remember that intelligence is not enough. Intelligence plus character – that is the goal of true education”.<sup>3</sup> Tanpa didukung oleh karakter yang kuat kecerdasan ibarat pisau tajam yang bisa jadi digunakan di luar peruntukannya.

Untuk menghentikan dan mengurangi segala fenomena keburukan tersebut maka tepatlah kiranya pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan) untuk merubah orientasi pendidikan dengan penguatan pada pendidikan karakter. Perubahan dan upaya untuk merekonstruksi sistem dan praktik pendidikan tersebut mendapatkan justifikasi empiris, karena faktanya praktik pendidikan kita telah “gagal” membentuk manusia sebagaimana diamanatkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional.<sup>4</sup> Pertanyaannya adalah “Model pendidikan karakter yang bagaimanakah yang kompatibel dengan kondisi Indonesia dan sebagai sebuah kebijakan memiliki probabilitas keberhasilan yang tinggi?”. Tulisan (hasil penelitian) ini mencoba memberi alternatif jawaban atas pertanyaan tersebut, yaitu model pendidikan karakter yang agama menjadi nilai rujukan primernya. Upaya kongkrit dan segera bisa dilakukan dalam sistem ini adalah melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan fungsi mata pelajaran yang sarat dengan materi moral-etik dan nilai-nilai akhlak mulia – pendidikan agama. Oleh karenanya, materi maupun sistem pembelajaran pendidikan agama harus mendapatkan perhatian serius, tidak hanya oleh guru agama tetapi semua elemen sekolah/madrasah secara komprehensif dan integratif.

<sup>2</sup> Muslih Usa, *Pendidikan Islam di Indonesia: antara cita dan fakta*. (Yogyakarta: PT Tiara Wacana. 2011), hlm. 43-44.

<sup>3</sup> Thomas Lichona, *Educating for Character: How our School Can Teach Respect and Responsibility*. (New York, Toronto. London. Sydney, Aucland: Bantam Book, 1991), hlm. 20

<sup>4</sup> Disamping tujuan pendidikan sebagaimana dirumuskan dalam UUSPN tahun 2003, dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas juga mengamanatkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk peningkatan iman dan takwa serta pembinaan iman dan takwa serta pembinaan akhlak mulia peserta didik, yang dalam hal ini adalah warga negara Indonesia.

## Pendidikan Karakter

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata karakter diartikan; tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, dan watak. Karakter juga bisa berarti huruf, angka, ruang, simbol khusus yang dapat dimunculkan pada layar dengan papan ketik.<sup>5</sup> Secara harfiah kata “karakter” merupakan kata serapan dari bahasa Inggris “*character*”, etimologis berasal dari akar kata dalam bahasa Yunani “*charassen*” yang berarti “*to engrave*”.<sup>6</sup> Secara harfiah kata “*to engrave*” berarti mengukir, melukis, memahatkan, atau menggoreskan.<sup>7</sup> Bila kata karakter tersebut dinisbatkan kepada orang dengan diberi awalan “ber” (orang ber-karakter) berarti orang yang memiliki kepribadian (berkepribadian), berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak. Dengan pengertian seperti ini maka kata karakter identik dengan kepribadian atau ahlak. Menurut Doni Koesoema, kepribadian merupakan ciri atau karakteristik atau sifat khas dari seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil, dan juga bawaan sejak lahir.<sup>8</sup>

Secara etimologi kata akhlak berasal dari bahasa Arab “*al-akhlaq*” yang merupakan bentuk jamak dari kata “*al-khuluq*” yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat.<sup>9</sup> Sedangkan secara terminologis, menurut Ibn Maskawih akhlak berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong kearah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran. Sedangkan menurut al-Ghazali, akhlak adalah suatu sifat yang tetap pada jiwa yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan kepada pikiran.<sup>10</sup> Dalam khazanah perbendaharaan bahasa Indonesia kata yang setara dengan dengan makna akhlak adalah moral dan etika. Dua kata ini sering disejajarkan dengan budi pekerti, tata susila, tata krama, atau sopan santun.<sup>11</sup> Menurut Muka Said, pada dasarnya secara konseptual kata etika dan moral mempunyai pengertian serupa, yakni sama-sama membicarakan perbuatan dan perilaku manusia ditinjau dari sudut pandang nilai baik dan buruk. Akan tetapi dalam aplikasinya etika lebih bersifat teoritis filosofis sebagai acuan untuk mengkaji sistem nilai, sedang moral bersifat praktis sebagai

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 682.

<sup>6</sup> Ryan, K. and Bohlin, K.E. *Building Character in School: Practical ways to Bring Moral Instruction to Life*. (San Francisco: Jossey Bass, 1999), hlm. 5.

<sup>7</sup> Echols, J. M. dan Sadily, H. *Kamus Inggris Indonesia*. (Jakarta: Gramedia. Cet. XV), hlm. 214.

<sup>8</sup> Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik anak di Zaman Global*, (Jakarta: Grasindo. Cet. I. 2007), hlm. 80.

<sup>9</sup> Hamzah Ya'qub, *Etika Islam: Pembinaan Ahlakul Karimah (suatu Pengantar)*. (Bandung: CV. Diponegoro, 1988), hlm. 11.

<sup>10</sup> Rachmat Djatnika, *Sistem Etika Islam (Akhlak Mulia)*. (Jakarta: Pustaka Panjimas. 1996), hlm. 27.

<sup>11</sup> Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam*. (Yogyakarta: Titihan Illahi Press, 1998), hlm. 178.

tolok ukur untuk menilai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Etika lebih memandang perilaku secara universal, sedang moral memandangnya secara lokal. Untuk mengaplikasikan akhlak, etika, atau moral dalam diri seseorang dimunculkan bidang ilmu yang disebut Pendidikan Akhlak, Pendidikan Etika, atau Pendidikan Moral.<sup>12</sup>

Sebagai sebuah konsep, beberapa pengertian karakter selalu merujuk pada jawaban atas pertanyaan "*how 'good' a person is*". Dengan kata lain seseorang yang menunjukkan perilaku berkualitas yang sesuai dan diharapkan oleh masyarakat maka seseorang itu dianggap telah memiliki karakter bagus (*good character*), dalam konteks pendidikan maka itulah yang menjadi tujuan pendidikan (*good citizen*). Seperti dikatakan oleh Suyanto, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap memper-tanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat.<sup>13</sup> Menurut Thomas Lickona, karakter adalah "*A reliable inner disposition to respond to situations in a morally good way*". Selanjutnya ditambahkan, "*character so conceived has three interelated parts, moral knowing, moral feeling, moral behaviour.*"<sup>14</sup> Dalam pengertian ini, karakter mulia (*good character*) mencakup pengetahuan tentang kebaikan, lalu menimbulkan komitmen (niat) terhadap kebaikan, dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan. Dengan kata lain, karakter mengacu kepada serangkaian pengetahuan (*cognitive*), sikap (*attitude*), dan motivasi (*motivation*), serta perilaku (*behaviour*) dan keterampilan (*skill*).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa esensi karakter sesungguhnya identik dengan akhlak, karena karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang universal meliputi seluruh aktivitas manusia, baik dalam rangka hubungan dengan Tuhan, dengan dirinya, dengan sesama manusia, maupun lingkungannya, yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya dan adat istiadat. Setelah kita memahami istilah karakter secara terpisah, selanjutnya akan dibahas konsep karakter bila dikaitkan dengan pendidikan atau menjadi satu kesatuan konsep dengan pendidikan yaitu "pendidikan karakter".

Sebagai sebuah konsep kata pendidikan oleh para ahli didefinisikan dalam rumusan redaksional yang berbeda meskipun pengertian substantifnya sama, yaitu "perubahan". Dengan kata lain pendidikan adalah proses transformasi, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak baik menjadi baik/lebih baik, dari tidak cakap

<sup>12</sup> Muka Sa'id, *Etika Masyarakat Indonesia*. (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986), hlm. 23-24.

<sup>13</sup> Suyanto, *Urgensi Pendidikan Karakter*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2009), hlm. 1.

<sup>14</sup> Thomas Lichona, *ibid*, 21.

menjadi cakap/terampil. Dalam istilah Douglas M. Windham, perubahan atau *output* pendidikan, yang meliputi: *cognitive achievement, improved manual skill, attitudinal change, behavioral change*.<sup>15</sup> Perubahan sebagai hasil (*output*) pendidikan tersebut, menurut Benyamin S. Bloom, mencakup tiga ranah, yaitu *cognitive domain, affective domain, and psychomotor domain*. Dalam ranah kognitif tujuan pendidikan mencakup dan berkaitan dengan: "...recall or recognition of knowledge and the development of intellectual abilities and skills". Pada ranah afektif; "...changes in interest, attitudes, and value, and the development of appreciations and adequate adjustment". Dan pada ranah psikomotorik; "... the manipulative or motor skill area – improve manual skills".<sup>16</sup> Disamping taksonomi tersebut, Romiszowski menambah satu ranah lagi yang disebut dengan *the missing domain*, yang diberi istilah *interactive skills*. Menurut Romiszowski (1984:42), tujuan pendidikan dikategorikan menjadi empat, dengan penekanan pada aspek *skill*, yaitu: (1) *Thinking or cognitive skills*. (2) *Acting, physical or motor skills*. (3) *Reacting to things, situation or people in term of values, emotions, feeling (self - control skills)*. (4) *Interacting with people in order to achieve some goals, such as communication, education, acceptance, persuasion, etc. (skills in controlling others)*.<sup>17</sup>

Dalam rumusan yang agak berbeda, Noeng Muhadjir, merumuskan pendidikan sebagai suatu aktivitas interaktif antara pemberi dan penerima untuk mencapai tujuan baik dengan cara baik dalam konteks positif. Atas dasar pemaknaan ini maka pendidikan memiliki tiga fungsi: (a) menumbuhkan kreativitas subyek didik. (2) memperkaya khasanah budaya manusia, memperkaya isi nilai-nilai insani dan nilai *Illahiyah*. (3) menyiapkan tenaga kerja produktif.<sup>18</sup>

Mencermati beberapa pengertian pendidikan di atas, sesungguhnya tujuan universal pendidikan adalah pembentukan sikap dan kepribadian yang diawali dari proses penyampaian informasi dan internalisasi nilai. Ini artinya tanpa diberi tambahan "karakter" sesungguhnya tujuan pendidikan adalah untuk pembentukan karakter peserta didik. Sebagaimana rumusan definisi pendidikan karakter yang dikemukakan oleh Ratna Megawangi; "...sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif kepada

<sup>15</sup> Douglas M. Windham, *Improving the efficiency of educational systems: Indicator of educational effectiveness and efficiency*, (New York: United State Agency for International Development Buereau for Science and Technology, 1990).

<sup>16</sup> Bloom, B.S. et al. (1979). *Taxonomy of educational objectives: The clasification of educational goals*. (London: Longman Group Ltd, 1956), hlm.7.

<sup>17</sup> Romiszowski, A.J. (1984). *Producing instructional system: Lesson planning for individualized and group lerning activities*. (London: Kogan Page Ltd., 1984), hlm. 42.

<sup>18</sup> Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan perubahan sosial: Teori pendidikan pelaku sosial kreatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 4.

lingkungannya.<sup>19</sup> Definisi lain dirumuskan, *Character education closely refers to teaching children in a manner that imparts one or more positive character qualities—such as to make them moral, civic, good, well mannered, non-bullying, healthy, critical, successful, traditional, compliant socially acceptable.*<sup>20</sup> Dalam istilah Fakry Gaffar, pendidikan karakter adalah sebuah proses transformasi nilai-nilai kehidupan untuk ditumbuhkembangkan dalam kepribadian seseorang sehingga menjadi satu dalam perilaku kehidupan orang itu”.<sup>21</sup> Dalam seting sekolah, menurut Dharma Kesuma dkk, pendidikan karakter: “pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku anak secara utuh yang didasarkan pada suatu nilai tertentu yang dirujuk oleh sekolah”.<sup>22</sup> Definisi ini bila disederhanakan maka, pendidikan karakter adalah “proses pembentukan perilaku berdasarkan nilai-nilai tertentu”. Menurut Gordon Allport, nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Kupperman, nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya diantara cara-cara tindakan alternatif. Dalam konteks pendidikan di Indonesia maka sudah sangat jelas bahwa nilai-nilai<sup>24</sup> yang dirujuk sebagai acuan pendidikan adalah nilai teosentris (wahyu) dan antroposentris (akal budi manusia).

Agar nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari diri peserta didik, yang harus dilakukan adalah penanaman nilai-nilai. Agar nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari peserta didik, maka harus ditransfer dan diinternalisasikan kepada peserta didik melalui proses pembelajaran. Oleh karenanya, perlu diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan dan pembelajaran yang holistik atau integratif.<sup>25</sup> Dengan metode atau model pembelajaran ini diharapkan akan tumbuh kesadaran bahwa orang mau melakukan perilaku yang baik karena dia cinta dengan perilaku kebaikan tersebut.<sup>26</sup> Dengan implementasi pendidikan karakter secara sistematis, berkelanjutan, dan sinergis seorang anak akan menjadi cerdas emosinya (kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual). Kecerdasan ini adalah bekal penting dalam

---

<sup>19</sup> Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter: Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*, (Bogor: Indonesia Heritage Foundation, 2004), hlm. 95.

<sup>20</sup> <http://www.WikipediaEncyclopedia,2012>), hlm. 1.

<sup>21</sup> Fakri Gaffar M., *Pendidikan Karakter Berbasis Islam*, (Yogyakarta: Makalah Seminar, 8-10 April 2010), hlm. 1.

<sup>22</sup> Dharma Kesuma, dkk., *Korupsi dan Pendidikan Anti Korupsi*, (Bandung: Pustaka Aulia Press, 2011), hlm. 5.

<sup>23</sup> Allport, G.W.. *Pattern and growth of personality*. (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1964), hlm. 24.

<sup>24</sup> Kupperman, J.J.. *The foundation of morality*. (London: George Allen and Unwin, 1983), hlm. 61.

<sup>25</sup> Azyumardi Azra, *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*, (Jakarta: Logos, 2002), hlm. 175.

<sup>26</sup> Masnur Muslih, *Pendidikan karakter: Menjawab tantangan krisis multidimensional*, (Jakarta: Bumi Aksara. Cet.1. 2011), hlm. 78.

mempersiapkan anak menyongsong masa depannya, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis.

### **Tujuan dan ruang lingkup Pendidikan Karakter.**

Menurut Thomas Lickona, tujuan pendidikan karakter adalah: "... *to develop student socially, ethically and academichly by infusing character development into every aspect of school culture and curriculum. To help student develop good character, wich include knowing, caring about and acting upon core ethical values such as respect, responsibility, honesty, fairness and compassion*".<sup>27</sup> Konsep dan model pendidikan seperti ini bila disebut dari sudut fungsinya disebut juga dengan istilah pendidikan holistic, karena "... *the highest function of education is to bring about an integrated individual who is capable of dealing with life as a whole*".

Dalam seting pendidikan di sekolah, pendidikan karakter bertujuan: (a) menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan yang dianggap penting dan perlu sehingga menjadi kepribadian/kepemilikan peserta didik yang khas sebagaimana nilai-nilai yang dikembangkan; (b) mengoreksi perilaku peserta didik yang tidak bersesuaian dengan nilai-nilai yang dikembangkan oleh sekolah; (c) membangun koneksi yang harmoni dengan keluarga dan masyarakat dalam memerankan tanggung jawab pendidikan karakter secara bersama.<sup>28</sup> Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan sekolah pendidikan karakter berfungsi: (a) mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik; (b) memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur; (c) meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Karena tuju dan fungsinya tersebut maka pendidikan karakter harus dilakukan melalui berbagai jenis pendidikan, maulai dari pendidikan keluarga, satuan pendidikan formal dan non formal, masyarakat sipil, masyarakat politik, pemerintah, dunia usaha, dan media massa.

Menurut Azyumardi Azra, ada sembilan pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu: (1), karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya; (2) kemandirian dan tanggungjawab; (3) kejujuran/amanah, diplomatis; (4) hormat dan santun; (5) dermawan, suka tolong-menolong dan gotong royong/kerjasama; (6) percaya diri dan pekerja keras; (7) kepemimpinan dan keadilan; (8) baik dan rendah hati, dan; (9) karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kesembilan pilar karakter itu, diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik dan integratif, antara lain dengan menggunakan metode *knowing the good*,

<sup>27</sup> Thomas Lichona, *ibid*, hlm. 21.

<sup>28</sup> Dharma Kesuma, *dkk.*, *ibid*. hlm. 71.

*feeling the good*, dan *acting the good*. *Knowing the good* bisa mudah diajarkan sebab pengetahuan bersifat kognitif saja. Setelah *knowing the good* harus ditumbuhkan *feeling loving the good*, yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan menjadi mesin penggerak yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat sesuatu kebaikan. Sehingga tumbuh kesadaran bahwa, orang mau melakukan perilaku kebajikan karena dia cinta dengan perilaku kebajikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebajikan, maka *acting the good* itu berubah menjadi kebiasaan.<sup>29</sup>

Menurut Michael Josephson, ada enam nilai etik dan sekaligus pilar pendidikan karakter, yaitu: (1) *Trustworthiness*, (2) *Respect*, (3) *Responsibility*, (4) *Fairness*, (5) *Caring*, dan (6) *Citizenship*. Disamping enam nilai etik tersebut, ada sebelas prinsip yang harus dipegang untuk efektifitas pelaksanaan pendidikan karakter, yaitu: (1); *Promotes core ethical value*; (2) *Teacher student to understand, care about, and act upon these core ethical value*; (3) *Encompassing all aspects of school culture*; (4) *Fosters a caring school community*; (5) *Offers opportunities for moral action*; (6) *Support academic achievement*; (7) *Develops intrinsic motivation*; (8) *Includes whole-staff development*; (9) *Requires positive leadership of staff and students*; (10) *Involves parents and community members*; (11) *Assesses results and strives to improve*.<sup>30</sup>

Poin penting yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan pendidikan karakter adalah, pendidikan ini harus diberikan secara sistematis dimulai sejak usia kanak-kanak (*golden age*), karena; (1) periode ini sangat menentukan pengembangan kemampuan dan potensi anak pada periode berikutnya, (2) variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Oleh karenanya, sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga, yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak. ada beberapa faktor-faktor yang secara empiris menjadi penyebab kegagalan anak di sekolah. Faktor-faktor tersebut bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi pada karakter, seperti: rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi.<sup>31</sup> Pendapat senada dikemukakan oleh Daniel Goleman, bahwa keberhasilan seseorang di masyarakat, ternyata 80 persen dipengaruhi oleh kecerdasan emosi, dan hanya 20 persen ditentukan oleh kecerdasan otak (*IQ*). Anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya, akan mengalami kesulitan belajar, bergaul dan tidak dapat mengontrol emosinya. Anak-anak yang bermasalah ini sudah dapat dilihat sejak usia pra-sekolah, dan kalau tidak ditangani akan terbawa sampai usia dewasa. Sebaliknya para remaja yang berkarakter akan terhindar dari masalah-masalah

<sup>29</sup> zyumardi Azra, *ibid*, hlm. 175.

<sup>30</sup> [http// www.character.org](http://www.character.org). (2009:152). Download 02-05-2013.

<sup>31</sup> Joseph Zins, *et.al.*, *Emotional Intelligence and School Success*, (New York: Phi Delta Kappa, 2001), hlm. 35.

umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas/menyimpang, dan sebagainya.<sup>32</sup>

## Madrasah: Pengertian dan sejarah singkat Madrasah

Sebagai salah satu varian kelembagaan pendidikan dan pendidikan Islam di Indonesia, eksistensi madrasah tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan (da'wah) Islam di nusantara. Secara kelembagaan, embrio kelahiran madrasah di Indonesia berasal dari majlis da'wah yang bernama *hallaqoh* yang dipimpin atau dilaksanakan oleh para tokoh penyebar agama (ulama') di masjid dan musholla. Lahirnya madrasah sebagai lembaga pendidikan dalam konteks sejarah pendidikan di Indonesia, disamping untuk meningkatkan efektivitas dan kapasitas pengajarannya juga didorong dan sebagai respon atas kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang mulai mengenalkan sistem pendidikan formal yang lebih sistematis dan teratur untuk pribumi, yang pada kenyataannya banyak anak dari keluarga muslim belajar di lembaga pendidikan tersebut. Langkah pemerintah kolonial ini tidak terlepas dari upaya misi kristen dan upaya untuk menghasilkan tenaga kerja murah untuk kepentingan penjajah.

Pada era kemerdekaan, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952, madrasah dirumuskan sebagai tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah yang memuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya. Dalam perkembangannya, sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 370 dan 373 Tahun 1993, madrasah mendapat definisi baru sebagai sekolah umum berciri khas Islam, dan dirumusan sebagai "pendidikan yang dijiwai ajaran agama Islam dan pendidikan yang dijiwai suasana keagamaan". Hal ini jelas sangat berbeda dengan status sebelumnya, dimana madrasah dikenal sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, ilmu pengetahuan umum bila ada hanyalah sebagai pelengkap atau tambahan.

Bentuk kelembagaan madrasah sebagai lembaga formal terdiri tiga tingkatan, yaitu Madrasah Ibtida'iyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Secara berurutan ekuivalen dan sejajar dengan lembaga pendidikan SD, SLTP dan SMU. Secara umum lembaga pendidikan madrasah ini dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, madrasah yang secara kelembagaan maupun substansi/proses pembelajarannya menggunakan pedoman dan standar yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang disebut dengan Sekolah Umum Berciri Khas

<sup>32</sup> Daniel Goleman, *emotional Intelligent (Kecerdasan Emosional)*. Alih Bahasa T. Hermaya, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 21.

Agama Islam. *Kedua*, madrasah eksistensinya secara kelembagaan maupun sistem pembelajarannya tidak terikat dengan pemerintah, sehingga status kelembagaannya semuanya adalah swasta. Dalam penyebutan sehari-hari disebut dengan madrasah *diniyah*. Dalam perkembangannya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, madrasah jenis kedua ini masuk dalam kategori Pendidikan Keagamaan, yaitu: "*pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/latau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya*". (Pasal 1 ayat [2]).

Pada era kolonial, berbagai fakta historis menunjukkan bahwa, Belanda tidak hanya tidak mengakui lembaga pendidikan yang didirikan oleh kelompok pribumi muslim, tetapi juga memandang rendah institusi (pendidikan) Islam tersebut. Karena persepsi negatif itulah, maka semua kebijakan yang diambil oleh Belanda terkait dengan pendidikan selalu diskriminatif dalam banyak hal. Model kebijakan seperti inilah yang terbawa sampai era kemerdekaan, yang antara lain melahirkan dikhotomi dan dualisme dalam pengelolaan pendidikan, dimana dalam sistem pendidikan di Indonesia ada sekolah yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri, dan madrasah (lulusan madrasah) yang menjadi korbannya karena kompetensi lulusannya dianggap tidak setara/ sederajat dengan lulusan sekolah. Fakta inilah yang mendorong keluarnya SKB tiga menteri tahun 1975 yang misi implisitnya adalah pengakuan akan kesamaan dan kesetaraan lulusan sekolah dengan madrasah.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, maka seluruh proses pengembangan pendidikan yang terdiri dari lembaga, struktur, kurikulum, materi dan konsep dasar lainnya berada pada satu paket, sebagaimana telah lama diperjuangkan lama sebelum kemerdekaan. Untuk memenuhi tuntutan undang-undang tersebut, terutama pasal yang berkaitan dengan kurikulum, dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 371, 372, dan 373 tahun 1993 tentang Kurikulum MI, MTs dan MA. Dari keputusan tersebut lahirlah kurikulum madrasah yang disebut dengan Kurikulum Madrasah Tahun 1994, yang isinya berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Pada kurikulum 1994 komposisi dan porsi waktu untuk materi Pendidikan Agama hanya lebih kurang 10%, sementara pada kurikulum 1984 30%.

Lahirnya undang-undang tersebut yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak hanya memperkokoh eksistensi madrasah secara yuridis dan politis, tetapi juga menghantarkan madrasah menjadi sub-sistem pendidikan nasional dan menghapus dualisme sistem pendidikan di

Indonesia. Atau dengan kata lain, lembaga pendidikan madrasah telah mendapatkan posisi yang selama ini diperjuangkan, yaitu kesamaan dan kesetaraan. Sebagai lembaga pendidikan berciri khas Islam, maka madrasah memiliki keunggulan komparatif, karena ada penekanan yang signifikan pada pendidikan agama dan akhlak (moralitas/karakter), disamping tentu pada penguasaan mata pelajaran umum (sain). Dengan keunggulannya tersebut madrasah berpeluang untuk menjadi “pendidikan alternatif” di tengah kegelisahan masyarakat akan kurangnya pemahaman nilai agama dan maraknya perilaku negatif dan dekadensi moral dalam kehidupan sehari-hari.

### **Model Kebijakan Pendidikan Karakter di Madrasah**

Misi kerasulan Muhammad SAW adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak bangsa Arab jahiliyah waktu itu dengan sistem keyakinan (agama) Islam yang bersumber dari wahyu Allah SWT. Misi kerasulan Muhammad diawali dengan pembinaan keimanan (aqidah) sebagai pondasi bagi perilaku muslim, baik dalam konteks hubungan vertikal (ibadah) dengan Allah SWT maupun dengan sesama manusia dan lingkungan alam semesta (*mu'amalah*). Dalam konsep Islam, akhlak mulia (*ahlakul karimah*) merupakan akumulasi dan kulminasi dari implementasi keseluruhan ajaran (syariah) yang didasari dengan pondasi keimanan (aqidah) yang kokoh. Seorang muslim yang memiliki aqidah yang kuat pasti akan mematuhi seluruh ketentuan (ajaran) agama Islam dengan melaksanakan perintah agama dan meninggalkan seluruh larangan agama, inilah yang disebut takwa. Dengan melaksanakan semua ketentuan agama dengan utuh (*kaffah*), seorang muslim akan memiliki ahlak mulia seperti yang sudah dipraktikkan oleh Muhammad SAW. Dengan demikian, agama sebagai pedoman dan sistem hidup sangat berperan bagi pembentukan karakter manusia.

Sebagai pedoman dan sistem hidup agama berisi sederet norma acuan (berupa perintah atau larangan) yang harus diketahui, dipahami, dihayati dan diamalkan. Untuk sampai pada tahapan mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan, seorang muslim harus belajar (untuk mengetahui, memahami, dan mengamalkan). Artinya, untuk sampai pada tahapan seseorang mampu berbuat baik perlu media dan cara. Dalam konteks peradaban modern lembaga pendidikan (formal) adalah jawabannya, karena dengan lembaga pendidikan dimungkinkan lebih efektif dan terukur proses *transfer of knowledge*, *transfer of values* dan/atau internalisasi nilai. Meskipun demikian, lembaga pendidikan informal dan non formal tetap memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan pendidikan formal. Sinergitas tiga jenis pendidikan tersebut akan sangat menentukan ketercapaian *nation character building*. Atas dasar kerangka pikir dan pemahaman seperti ini

maka tepat sekali pilihan bangsa ini yang mewajibkan semua jenjang pendidikan untuk mengajarkan agama dalam sistem pembelajarannya, sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan (keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia). Untuk peserta didik yang beragama Islam mata pelajaran di sekolah/madrasah itu bernama Pendidikan Agama Islam (PAI).<sup>33</sup>

Sebagai mata pelajaran, PAI di sekolah memiliki peranan penting dalam penyadaran nilai-nilai agama Islam kepada peserta didik. Muatan mata pelajaran PAI yang mengandung nilai moral dan etika agama menempatkan PAI pada posisi terdepan dalam pengembangan moral atau keberagamaan siswa. Hal ini sekaligus berimplikasi pada tuntutan tugas guru PAI menjadi lebih banyak perannya dalam penyadaran nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sebagai mata pelajaran PAI memiliki beberapa karakteristik, yaitu: (1) PAI merupakan mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok agama Islam; (2) PAI bertujuan membentuk peserta didik agar beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, serta memiliki akhlak mulia; (3) PAI mencakup tiga kerangka dasar yaitu aqidah, syari'ah, dan akhlak.<sup>34</sup> Berdasarkan karakteristik tersebut, maka PAI jelas berbeda dari mata pelajaran lainnya. Karena muatan PAI adalah nilai-nilai kebenaran dan kebaikan (juga keindahan) yang berasal dari wahyu. Nilai-nilai PAI tersebut tercakup dalam tiga kerangka dasar PAI yang harus dikuasai untuk diamalkan dan/atau menjadi nilai hidup yang dipegangi.

Meskipun nomenklturnya sama, namun isi materi PAI antara sekolah dan madrasah jauh berbeda, dalam arti keluasan dan kedalaman pembahasannya. Untuk SMU PAI diberikan dalam satu paket mata pelajaran diajar oleh satu guru yang disebut guru agama. Sedangkan di madrasah PAI bukan nama mata pelajaran tapi rumpun mata pelajaran (rumpun PAI), yang dijabarkan kedalam lima mata pelajaran yang diajarkan oleh guru yang berbeda. Mata pelajaran tersebut meliputi: (1) Qur'an-Hadits, (2) Aqidah Akhlak, (3) Fiqh, (4) Sejarah Kebudayaan Islam, dan (5) Bahasa Arab<sup>35</sup>.

Tujuan atau kompetensi pembelajaran PAI di SMA, sebagaimana dirumuskan dalam Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah: (1) memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan fungsi manusia sebagai *khallifah*, demokrasi serta

<sup>33</sup> Untuk mata pelajaran umum antara sekolah dan madrasah sama, karena mengacu pada regulasi yang sama yaitu tentang Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan inilah kemudian menjadi acuan dalam pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pada sistem ini, kurikulum tidak lagi disusun oleh pemerintah pusat, tetapi diserahkan kepada masing-masing sekolah.

<sup>34</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.

<sup>35</sup> Struktur dan komposisi kurikulum seperti ini dimulai pada tahun 1994, yang dikenal dengan "Kurikulum 1994". Sebelumnya mata pelajaran agama Islam yang diberikan, berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 110 Tahun 1982, adalah: (1) Al-Qur'an-Hadits, (2) Bahasa Arab, (3) Aqidah, (4) Ibadah, (5) Akhlak, (6) Fiqih, (7) Sejarah dan Peradaban Islam.

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) meningkatkan keimanan kepada Allah SWT sampai pada Qodha dan Qodar melalui pemahaman terhadap sifat dan *Asmaul Husna*; (3) berperilaku terpuji seperti *husnudhon, taubat, raja'*, dan meninggalkan perilaku tercela seperti *isyraf, tabzir*, dan fitnah; (4) memahami sumber hukum Islam dan hukum taklifi serta menjelaskan hukum mu'amalah dan hukum keluarga dalam Islam; (5) memahami sejarah nabi Muhammad SAW pada periode Makkah dan periode Madinah serta perkembangan Islam di Indonesia dan di dunia.<sup>36</sup> Bila dicermati, sesungguhnya lima kompetensi PAI tersebut merupakan penjabaran dari kompetensi materi (mata pelajaran): kompetensi nomer 1 mata pelajaran Qur'an Hadists, kompetensi nomer 2 dan 3 mata pelajaran Aqidah-Akhlak, kompetensi nomer 4 mata pelajaran Fiqih, dan kompetensi nomer 5 mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Dengan kata lain, isi dari materi PAI untuk SMA adalah yang tercakup dalam empat pelajaran tersebut, bahasa Arab tidak termasuk materi dalam PAI di SMA.

Meskipun materi pembahasan Madrasah sudah relatif luas dan mendalam dibandingkan dengan di SMA, untuk madrasah swasta masih ditambah lagi dengan beberapa mata pelajaran yang terangkum dalam muatan lokal maupun kurikulum lokal. Penambahan tersebut berkonsekuensi pada penambaham frekuensi dan durasi jam tatap muka pembelajaran. Dengan kata lain proses pembelajaran dengan isi/materi pendidikan agama di madrasah lebih banyak, mendalam dan luas dibanding di sekolah. Ini artinya peluang keberhasilan transformasi dan internaslisasi nilai-nilai agama untuk mencapai tujuan pendidikan (iman, takwa dan akhlak mulia) lebih besar dibanding dengan sekolah. Mata pelajaran tambahan tersebut terutama terkait dengan ilmu-ilmu bantu (*ilmu alat*) untuk mendukung ketercapaian kompetensi keagamaan, seperti: *nabwulshorof, ulumul qur'an, ulumul hadits, ushul fiqh* dan lain sebagainya. Penambahan tersebut dimaksudkan untuk pendalaman dan pengayaan pengetahuan (ilmu) agama sesuai visi-misi spesifik dan untuk mencapai tujuan spesifik madrasah, yaitu kompetensi keagamaan.<sup>37</sup> Fakta ini dapat dipahami karena konteks historis kelahiran madrasah tidak dapat dipisahkan dari da'wah Islamiyah. Karakter dan tujuan spesifik madrasah ini dapat dilihat dari rumusan visi-misi semua MA di kodus. Meskipun dalam rumusan redaksi yang berbeda, semua rumusan visi-misi tersebut mengandung dua hal utama yang ingin dicapai,

<sup>36</sup> Kementerian Pendidikan Nasional, Standar Isi Tahun 2006.

<sup>37</sup> Kompetensi keagamaan yang dimaksud disini adalah kemampuan spesifik yang dimiliki oleh peserta didik untuk terlibat aktif dalam kegiatan keagamaan bahkan menjadi tokoh agama, atau setidaknya menjadi pemimpin kegiatan agama (ritual keagamaan) di desa/kampung. Dengan kompetensi ini, maka lulusan MA akan memiliki kesiapan untuk: (1) melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi dengan PTAI sebagai pilihannya, dan (2) terjun di masyarakat menjadi tokoh agama atau setidaknya menjadi pemimpin kegiatan (ritual) keagamaan di lingkungan desa/kampung tempat mereka tinggal.

yaitu (1) diperolehnya pengetahuan umum dan agama, dan (2) terbentuknya akhlak mulia peserta didik. Kedua hal tersebut sebagai bekal untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*sa'adah fi daroini*).<sup>38</sup>

Merujuk pada segala pengertian tentang konsep pendidikan karakter dan melihat realitas empiris lembaga pendidikan madrasah – struktur kurikulum (nasional dan lokal) dan tujuan pembelajarannya – sesungguhnya lembaga pendidikan ini adalah model pendidikan karakter atau pendidikan berbasis karakter yang sudah ada dan kita miliki selama ini. Mengapa kita mesti harus repot mencari rujukan model pendidikan karakter dari Barat, yang belum tentu konsep nilainya sama dengan yang kita inginkan. Pendidikan adalah masalah fundamental bagi suatu bangsa yang selalu dan pasti terkait dengan kultur, persepsi bahkan keyakinan masyarakat. Oleh karena itu para ahli pendidikan sepakat bahwa sistem serta tujuan pendidikan bagi suatu masyarakat atau negara tidak dapat diimpor atau diekspor dari suatu negara atau masyarakat. Dalam istilah Azyumardi Azra, pendidikan harus tumbuh dan “dijahit” sesuai dengan bentuk dan ukuran pemakainya, berdasarkan identitas, pandangan hidup serta nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat atau negara tersebut. Maka tidak ada konsep dan teori pendidikan yang berlaku atau bisa diterapkan secara menyeluruh, dalam arti bisa berlaku untuk tempat dan seting yang berbeda.<sup>39</sup>

Bahwa madrasah selama ini kurang menunjukkan daya tariknya untuk masyarakat perkotaan (baca: *well inform and well educated*), secara jujur harus kita akui memang benar adanya. Ketidaktertarikan atau bahkan ketidakpercayaan kelompok masyarakat tertentu terhadap madrasah lebih disebabkan persepsi dan keyakinan mereka bahwa lembaga pendidikan ini kurang maju dalam pembelajaran mata pelajaran umum (baca: sains), sehingga mengurangi peluang untuk memenangkan kompetisi dalam merebutkan peluang untuk mendapatkan pendidikan pada jenjang berikutnya. Kurang berkualitasnya proses dan hasil pembelajaran tersebut, karena sebagian besar madrasah menghadapi berbagai kekurangan, terutama aspek finansial dan kualitas sumberdaya manusia. Fakta ini terjadi karena secara nasional 85% madrasah dikelola oleh masyarakat (swasta),<sup>40</sup> dan mayoritas di pedesaan. Fakta ini pulalah yang memunculkan persepsi pemerintah telah berlaku diskriminatif dan

<sup>38</sup> Berikut contoh lengkap rumusan visi-misi serta kurikulum lokal salah satu MA swasta di Kudus, yaitu MA Qudsiyah Kudus. Visi: “Terwujudnya insan yang *tafaqquh fiddin* beramal sholih dan berakhlak karimah dalam rangka mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrowi”. Misi: “Menanamkan ajaran Islam dan ilmu-ilmu terkait secara terpadu melalui pendidikan formal, non formal, maupun informal yang dilaksanakan secara Islami dan terjangkau oleh segala lapisan masyarakat”.

<sup>39</sup> Abudin Nata, *Metodologi studi Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 7.

<sup>40</sup> Contoh: di Kabupaten Kudus terdapat 29 Madrasah Aliyah yang berstatus negeri hanya 2, dari 55 MTs hanya 2 yang berstatus negeri, dari 133 MI hanya 1 yang berstatus negeri (Sumber data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus tahun 2010).

tidak adil terhadap madrasah, karena seolah pemerintah membiarkan madrasah untuk berjuang sendiri menghadapi berbagai persoalan yang ada. Berbeda dengan sekolah yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mendapatkan segala fasilitas dan pendanaan, sementara madrasah dikelola oleh Kementerian Agama yang tugas utamanya sesungguhnya bukan mengurus urusan pendidikan. Secara politis madrasah sebagai lembaga pendidikan memang terlambat untuk diapresiasi (baca: diakui eksistensinya), karena secara politik madrasah dan juga pesantren pada masanya (era penjajahan) menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan melawan penjajah. Harus diakui sistem pendidikan persekolahan yang kita anut saat ini merupakan kelanjutan sistem persekolahan yang diperkenalkan oleh Belanda kepada pribumi. Oleh karena itu, sejak era penjajahan sampai era awal kemerdekaan antara sekolah dan madrasah seolah memiliki cara dan jalan masing-masing meskipun tujuan substantifnya sama – mencerdaskan bangsa.

Bila dikelola secara baik dan benar sesungguhnya madrasah akan menjadi lembaga pendidikan “plus” dan model pendidikan karakter, yang sesungguhnya dibutuhkan bangsa ini untuk membangun karakter bangsa dengan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Meskipun ilmu pengetahuan (sains) adalah penting dalam rangka penguasaan teknologi, namun berbagai kebijakan yang terlalu berorientasi pada capaian kognitif (*cognitive achievement*) semata dan kurang perhatian terhadap pendidikan agama telah terbukti menyebabkan hasil pendidikan kita kehilangan makna substantifnya. Keseimbangan antara capaian kognitif dan pembentukan karakter melalui pendidikan agama dan semua mata pelajaran secara sinergis akan menjadi jawaban atas semua persoalan bangsa yang bersumber dari rendahnya moralitas dan akhlak mulia. Secara jujur harus diakui, target-target matematis hasil pendidikan dan pengabaian dan pengasingan nilai-nilai etik dan moralitas agama telah secara sistematis menghilangkan dan mereduksi tujuan dan nilai-nilai holistik sebuah proses pendidikan.

Persoalannya adalah tinggal bagaimana *political will* dan/atau pilihan kebijakan (*political action*) yang akan diambil dalam rangka implementasi pendidikan karakter. Ada opsi yang bisa diimplementasikan terkait dengan hal tersebut. *Pertama*, pemerintah sudah saatnya berlaku proporsional dan adil terhadap Madrasah, terutama dari aspek pembiayaan dan sumberdaya manusia agar segala kekurangan yang ada pada madrasah dapat dihilangkan atau setidaknya di minimalisir. Dari sudut realitas peserta didik, madrasah seharusnya lebih layak mendapatkan perhatian (baca: bantuan finansial) dari pemerintah. Selama ini operasional pendidikan di madrasah ditanggung oleh orang tua murid yang nominalnya jauh dari mencukupi untuk berlangsungnya proses pendidikan berkualitas. Hal ini terjadi karena mayoritas peserta didik yang belajar di madrasah

berasal dari golongan menengah kebawah dari pedesaan. Oleh karena itu, dengan membantu madrasah (swasta) secara proporsional pemerintah telah melaksanakan dua hal penting yang dihadapi oleh masyarakat (mayoritas umat) dan dunia pendidikan saat ini, yaitu: (1) pemerintah telah mengimplementasikan pendidikan karakter dengan model format kelembagaan madrasah; (2) pemerintah telah membantu meringankan beban orang miskin yang mayoritas belajar di madrasah. Dengan langkah tersebut, berbagai perilaku buruk dan menyimpang yang terjadi di masyarakat secara bertahap dan pasti akan semakin berkurang karena semakin banyak warga masyarakat (lulusan madrasah) yang terbentengi dirinya dengan perisai agama sebagai buah pendidikan karakter yang diterapkan di madrasah.

*Kedua*, untuk menjamin agar pendidikan karakter di sekolah (umum) lebih efektif, sudah sepatutnya kurikulum Pendidikan Agama Islam di sekolah (SD, SMP, dan SMA/SMK) disusun ulang untuk memastikan hasil pendidikan (beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia) dapat tercapai dengan baik. Cara yang bisa ditempuh antara lain melalui penguatan PAI, dalam arti durasi dan frekuensi pembelajaran ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya. Secara jujur harus diakui bahwa, pembelajaran PAI di sekolah selama ini terlalu singkat dan terbatas sehingga terkesan formalitas. Keadaan tersebut secara sistematis telah menjadikan (ajaran) agama hanya sebagai pengetahuan yang tidak berkorelasi positif dengan perilaku. Karena pengetahuan hanya akan bisa turun menjadi perilaku (*behavior*) manakala pengetahuan tersebut telah terinternalisasi pada diri peserta didik melalui proses pembiasaan (*habituation*). Artinya pembelajaran PAI di sekolah seperti yang ada saat ini akan sulit membentuk karakter dan mengasikkan perilaku mulia karena pembelajarannya dilaksanakan sangat terbatas frekuensi dan durasinya. Dengan kata lain pembelajaran PAI selama ini kuantitas maupun kualitasnya sangat tidak memadai untuk proses *habituation* dan *modeling*.

Dalam berbagai kasus, bila seorang anak hanya mendapatkan pendidikan agama dari sekolah, karena satu dan lain hal keluarga dan masyarakat tidak memungkinkan terjadinya pendidikan agama, maka dapat dipastikan pengetahuan agama yang diperolehnya sangat dangkal dan tipis sehingga tidak cukup menjadi potensi untuk penangkal kemungkar. Oleh karenanya, peningkatan kualitas dan kuantitas pembelajaran PAI di sekolah menjadi sebuah konsep yang sangat rasional untuk diimplementasikan. Bagaimana model struktur kurikulum yang cocok untuk diterapkan di sekolah agar hasil pendidikan benar-benar menghasilkan pribadi-pribadi yang berkarakter dan ber-*akhlakul karimah*? Berdasarkan paparan fakta empiris serta analisis di atas, maka pilihan kebijakan yang bisa ditempuh oleh pemerintah adalah dengan restrukturisasi dan rekonstruksi kurikulum dengan mengadopsi model kurikulum yang selama ini telah diterapkan di madrasah. Poin

penting yang bisa diambil dari kurikulum madrasah adalah komposisi kurikulum yang seimbang antara pengetahuan umum (sain) dan pengetahuan agama. Dengan model kurikulum tersebut dan didukung dengan sarana dan sistem/model pembelajaran yang tepat kita patut optimis apa yang diinginkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional akan tercapai.

Dari sudut teori kebijakan, peluang keberhasilan pendidikan karakter dengan mengadopsi model pendidikan madrasah lebih besar, karena secara sosio-kultural dan sosio-religius madrasah adalah salah satu varian pendidikan yang tumbuh dan berkembang dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat (umat). Seperti dikatakan oleh Seidman, kebijakan pendidikan atau *social intervention in education*, tidak serta merta akan menghasilkan perubahan kearah yang lebih baik, karena kebijakan pendidikan dan pendidikan itu sendiri tidak berdiri sendiri tetapi banyak faktor yang terlibat, mempengaruhi dan bahkan menentukan. Bahkan tidak jarang suatu kebijakan yang didesain untuk menghasilkan perubahan, tidak menghasilkan apa-apa karena tidak didukung oleh berbagai faktor, terutama yang ada dalam lembaga pendidikan itu sendiri.<sup>41</sup> Sebagaimana dikatakan Fullan, "*the purpose of educational change presumably is to help school accomplish their goals more effectively by replacing some structures, program and/or practice with the better ones*".<sup>42</sup>

Kesulitan atau kendala implemetasi kebijakan dalam banyak hal disebabkan oleh seting dan konteks sasaran kebijakan itu sendiri. Karena sebagai paranata sosial lembaga pendidikan adalah sebuah organisasi yang memiliki tradisi/budaya yang dibangun dan menjadi acuan dalam berorganisasi, yaitu budaya organisasi (*organisational culture*). Atas dasar pemahaman ini maka keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari perubahan struktur suatu organisasi, tetapi lebih dari itu menjangkau pada perubahan budaya organisasi. "*Organisational culture refers to the pattern of beliefs, values and learned ways of coping with experience that have developed during the course of an organisation's history, and which tend to be manifested in its material arrangement and in the behavioral of its members*". Menurut Brown, budaya suatu organisasi berisi (*contents of an organisation's culture*): (1) *artifacts*, (2) *language*, (3) *behaviour pattern*, (4) *norm of behaviour*, (5) *heroes*, (6) *symbols and symbolic action*, (7) *belief, values, and attitudes*, (8) *ethical codes*, (9) *basic assumptions*, and (10) *history*.<sup>43</sup> Menurut Ali Imron, ada enam faktor yang mempengaruhi implementasi (keberhasilan) suatu kebijakan: (1) Kompleksitas berbagai kebijakan yang telah dibuat, (2) ketidakjelasan rumusan masalah kebijakan dan alternatif

<sup>41</sup> E. Seidman, *Handbook of social intervention*, (Beverly Hill/London/New Delhi: Sage Publication, 1983), hlm. 323.

<sup>42</sup> M. G. Fullan, *The new meaning of educational change*, (England: Cassell Educational Limited, 1991), hlm. 15.

<sup>43</sup> E. D. Brown, *Organisational culture*, (London: Prentice Hall, 1989), hlm. 9.

pemecahan masalah kebijakan, (3) ketersediaan sumber-sumber potensial yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan, (4) kemampuan dan keahlian pelaksana kebijakan, (5) dukungan dari khalayak sasaran kebijakan, dan (6) efektivitas dan efisiensi birokrasi.<sup>44</sup>

## Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai sebuah konsep, dilihat isi dan tujuannya antara pendidikan karakter dan pendidikan akhlak memiliki kesamaan substantif yaitu sama-sama bertujuan untuk membentuk karakter bangsa dengan nilai-nilai tertentu. Dari sudut nilai yang dirujuk inilah terjadi perbedaan, pendidikan karakter merujuk pada nilai-nilai antroposentris sedangkan pendidikan akhlak merujuk pada nilai-nilai teosentris. Merujuk pada rumusan tujuan pendidikan nasional, nilai sentral yang dirujuk sebagai dasar dan tujuan pendidikan karakter adalah nilai-nilai yang bersumber dari agama. Artinya karakter yang ingin dibentuk adalah karakter yang berdasar ajaran agama; beriman, bertakwa dan berakhlak mulia.

Karena agama menjadi *reffered value* maka pembelajaran agama harus menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Pengesampingan dan pengabaian pendidikan agama akan berpeluang menimbulkan ketidak-seimbangan antara capaian kognitif (intelektual) dan afektif (kepribadian). Sistem pendidikan madrasah adalah model pendidikan karakter atau pendidikan berbasis karakter yang cocok untuk kondisi di Indonesia, karena secara empiris lembaga pendidikan ini sudah ada lama sebelum Indonesia merdeka. Oleh karenanya, model pendidikan ini bisa dikembangkan dan didopsi untuk diterapkan dalam sistem persekolahan di Indonesia.

---

<sup>44</sup> Ali Imron, *Kebijakan pendidikan di Indonesia: Proses produk dan masa depannya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 76-77.

## Rujukan

- Al-Attas, S. M. N, *The Concept of Education in Islam: A framework of an Islamic Philosophy of Education*, Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia, 1996.
- Allport, G.W, *Pattern and Growth of personality*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1964.
- Arsohah, Hanum, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999.
- Azra, Azyumardi. *Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*. Jakarta: Logos, 2003.
- Bloom, B.S. *et al*, *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*, London: Longman Group Ltd, 1979.
- Brown, E.D., *Organisational Culture*, London: Prentice Hall, 1989
- Burhanudin, J. & Dina A., *Eds. Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Daradjat, Zakiah. *et al.*, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Akasara bekerja sama dengan Direktorat Jnendral Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 2004.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa. Cet. I, 2008.
- Departemen Agama RI, *Sejarah Madrasah: Pertumbuhan Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, 2004.
- Dharma, Kesuma, dkk., *Korupsi dan Pendidikan Anti Korupsi*, Bandung: Pustaka Aulia Press. 2011.
- Djatnika, Rachmat, *Sistem Etika Islam (Akhlak Mulia)*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996.
- Koesoema, Doni, *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik anak di Zaman Global*, Jakarta. Grasindo. Cet. I, 2007.
- Fullan, M. G, *The New Meaning of Educational Change*, England: Cassell Educational Limited, 1991.

- Gaffar M, Fakri, *Pendidikan Karakter Berbasis Islam*, Yogyakarta: Makalah Seminar (8-10 April 2010).
- Goleman, D, *Emotional Intelligence (Kecerdasan Emosional)*, Alih Bahasa T. Hermaya, Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Imron, Ali, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Proses produk dan masa depannya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Jalal, Abdul F, *Min Usul al-Tarbiyah fi al-Islam*, Kairo: Darul al-Kutub al-Misriyah, 1977.
- Josephson, M, *Making ethical decisions: the Six Pillars character education*, New York: Josephson Institute, 2013.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 370 dan 373 tahun 1993 tentang Kurikulum MI, MTs, dan MA.
- Kupperman, J.J, *The Foundation of Morality*, London: George Allen and Unrwin, 1983.
- Langgulong, Hasan, *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisis Psikologi dan Pendidikan*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1997.
- Lichona, Thomas, *Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*, New York, Toronto. London. Sydney, Aucland: Bantam Book, 1991.
- Maksum, *Madrasah: Sejarah dan perkembangannya*, Jakarta: Logos, 1999.
- Megawangi, Ratna, *Pendidikan Karakter: Solusi yang Tepat untuk Membangun Bangsa*, Bogor: Indonesia Heritage Foundation, 2004.
- Muhaimin, et al., *Paradigma pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan pendidikan agama Islam di sekolah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muka Said, *etika Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Padnya Paramita, 1984.
- Muslih, Masnur, *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisi Multidimensional*, Jakarta: Bumi Aksara. Cet.1, 2011.
- Musthofa, A. & Aly, A, *Sejarah Pendidikan Islam: Untuk Fakultas Tarbiyah Komponen MKDK*, Bandung: PT Pustaka Setia, 1999.
- Romiszowski, A.J, *Producing Instructional System: Lesson Planning for Individualized and Group Learning Activities*, London: Kogan Page Ltd. 1984.

- Ryan, K. dan Bohlin, K.E, *Building character in Schools Practical Ways to Bring Moral Instruction to Life*, San Francisco: Jossey Bass, 1999.
- Seidman, E., *Handbook of social intervention*, Beverly Hill/London/New Delhi: Sage Publication, 1983.
- Steenbrink, K. A, *Pesantren madrasah sekolah: Pendidikan Islam dalam kurun modern*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Suwito & Fauzan, (Eds.), *Perkembangan pendidikan Islam di nusantara: Studi perkembangan sejarah dari abad 20M*, Bandung: Angkasa, 2004.
- Suyanto, *Urgensi Pendidikan Karakter*, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah: Jakarta, 2009.
- Tafsir, Ahmad, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002.
- Tajab, et al., *Dasar-dasar kependidikan Islam: Suatu pengantar pendidikan Islam*, Surabaya: Karya Aditama, 1996.
- Usa, Muslih, *Pendidikan Islam di Indonesia: antara cita dan fakta*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 1991
- Webster's New Dictionary and Thesaurus*. New Lanark–Scotland, Geddes & Grosset Ltd, 1990.
- Windham, D. M, *Improving the Efficiency of Educational Systems: Indicator of Educational Effectiveness and Efficiency*, New York: United State Agency for International Development Buereau for Science and Technology, 1990.
- www.chracter.org. (2009:152). Download: 02-05-2013.
- Ya'kub, Hamzah, *Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah (suatu pengantar)*, Bandung: CV. Diponegoro, 1988.
- Zins, Joseph. et al, *Emotional Intelligence and School Success*, New York: Phi Delta Kappa, 2001.
- Zuhairini, et al., *Sejarah pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara Bekerja- sama dengan Dirjen Bagais Departeme Agama RI, 2004.